

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

#### **1.1.1 Sejarah Singkat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat**

Reformasi birokrasi Pemerintah daerah merupakan kebutuhan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Reformasi birokrasi di bidang organisasi perangkat daerah diarahkan untuk terciptanya organisasi yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.

Sejalan dengan polingan ditetapkannya PP 41 tahun 2007 tentang organisasi Perangkat Daerah dan guna mendorong tercapainya visi dan misi di bidang aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah telah dibentuk Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan dengan Perda No.22 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah merupakan Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat merupakan Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai Tugas Pokok melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik serta berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

#### **1.1.2 Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daaerah Provinsi Jawa Barat**

##### **a. Visi**

Dalam rangka peningkatan kualitas pembangunan di Jawa Barat sesuai tema Pembangunan Jawa Barat yaitu pembangunan Jawa Barat yang lebih fokus, efektif dan sinergitas berderajat tinggi, berbasis multi pihak dan mitra strategis global untuk mewujudkan masyarakat Jawa Barat yag lebih maju dan sejahtera serta memperhatikan 10 (sepuluh) *Common Goal* prioritas pembangunan

Provinsi Jawa Barat, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat menetapkan visi:

***“Terwujudnya Aparatur yang BAIK dan Sejahtera”***

Penjabaran makna dari Visi BKD Provinsi Jawa Barat tersebut adalah sebagai berikut:

**1) BAIK (Bermutu, Akuntabel, Inovatif dan Kreatif):**

- a) **Bermutu:** Memiliki kualitas atau memenuhi atau melebihi standar kualitas yang telah ditentukan.
- b) **Akuntabel:** Dapat mempertanggungjawabkan setiap langkah/kegiatan yang telah dilaksanakan.
- c) **Inovatif:** Memiliki sifat memperkenalkan/menampilkan sesuatu pembaharuan (kreasi baru).
- d) **Kreatif** Memenuhi daya cipta atau memiliki kemampuan menciptakan sesuatu yang bermanfaat atau meningkatkan manfaat.
- e) **Sejahtera:** Memiliki rasa aman, nyaman dan tenteram baik secara lahir/materi maupun bathin/jiwa.

**b. Misi**

Mengacu kepada Visi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dimaksud, maka Misi yang akan dilaksanakan tahun 2013 – 2018 adalah:

**Misi 1: Meningkatkan disiplin dan profesionalisme pegawai**

**Misi 2: Mewujudkan modernisasi sistem kepegawaian**

**Misi 3: Meningkatkan kesejahteraan aparatur berbasis kinerja.**

**1.1.3 Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat**

Stuktur organisasi pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) pada Povinsi Jawa Barat terdiri dari :

- a. Kepala
- b. Sekretariat, membawahkan

- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Program
  - 2) Sub Bagian Keuangan
  - 3) Sub bagian kepegawaian dan umum
- c. Bidang pengadaan dan informasi Kepegawaian, membawahkan:
- 1) Sub Bidang Pengadaan dan Formasi Pegawai
  - 2) Sub Bidang Sistem Informasi Kepegawaian
- d. Bidang mutasi dan administrasi kepegawaian, membawahkan:
- 1) Sub bidang kepangkatan dan pension
  - 2) Sub bidang perpindahan dan administrasi kepegawaian
- e. Bidang pengembangan karir, membawahkan:
- 1) Sub bagian kompetensi dan kinerja
  - 2) Sub bagian penempatan dan jabatan
- f. Bidang kesejahteraan dan disiplin, membawahkan:
- 1) Sub bidang kesejahteraan pegawai
  - 2) Sub bidang disiplin dan penghargaan

#### **1.1.4 Deskripsi Jabatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat**

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai susunan organisasi sebagai berikut:

a. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat

Kepala Badan mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Badan Kepegawaian Daerah.

b. Sekretariat Badan Kepegawaian Daerah

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program Badan, pengkajian perencanaan dan program, pengelolaan keuangan kepegawaian, dan umum. Sekretariat mempunyai fungsi:

- 1) Menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program badan.
- 2) Menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan.
- 3) Menyelenggarakan pengelolaan urusan perencanaan dan program, keuangan, kepegawaian dan umum.

- 4) Sekretariat membawahkan:
  - a) Sub bagian Perencanaan dan Program
  - b) Sub bagian Keuangan
  - c) Sub bagian Kepegawaian dan Umum

### 1.1.5 Logo Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat



**Gambar 1.1 – Logo BKD Prov. JaBar**

*(Sumber: Website BKD Provinsi Jawa Barat 2017)*

### 1.2 Latar Belakang

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah disahkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 15 Januari 2014 maka PNS (Pegawai Negeri Sipil) berubah nama menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara). Dalam Undang-Undang No 5 Tahun 2014 menyatakan bahwa “Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas

dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu faktor penentu dalam proses pembangunan yang dinamis sehingga memiliki peranan yang lebih besar, terutama dalam penyelenggaraan program pemerintah. Kelancaran penyelenggaraan program pemerintah dan pelaksanaan pembangunan memerlukan suatu pembinaan terhadap aparatur negara. Aparatur Sipil Negara sebagai unsur utama sumber daya manusia yang mempunyai peranan penting dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan program pemerintah dan pembangunan. Oleh karena itu tidak dapat dipungkiri bahwa faktor manusia merupakan modal utama yang perlu diperhatikan dalam suatu pemerintahan. Hal tersebut sangatlah penting karena keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan ditentukan oleh kualitas dan kemampuan sumber daya manusia.

Dalam menghadapi era globalisasi, semua organisasi akan menghadapi kondisi lingkungan yang dinamis dimana orang tersebut dipaksa untuk mengikuti perkembangan dan perubahan yang cepat. Perkembangan dan perubahan yang cepat menyebabkan organisasi membutuhkan keunggulan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompetitif dan berkualitas agar dapat meningkatkan prestasi kerja pegawai dalam kondisi lingkungan yang terus berubah akibat era globalisasi.

Salah satu langkah untuk mendapatkan sumber daya manusia yang kompetitif dan berkualitas adalah dengan mulai mendapatkan dan memiliki pegawai yang sesuai dengan standar personalia organisasi (Sunyoto 2012:48). Standar ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi agar seorang pegawai dapat mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Disamping itu langkah selanjutnya untuk mendapatkan sumber daya manusia yang kompetitif dan berkualitas adalah dengan memberikan pendidikan dan pelatihan terhadap setiap pelaku organisasi secara berkesinambungan dengan metode yang sistematis dan terarah.

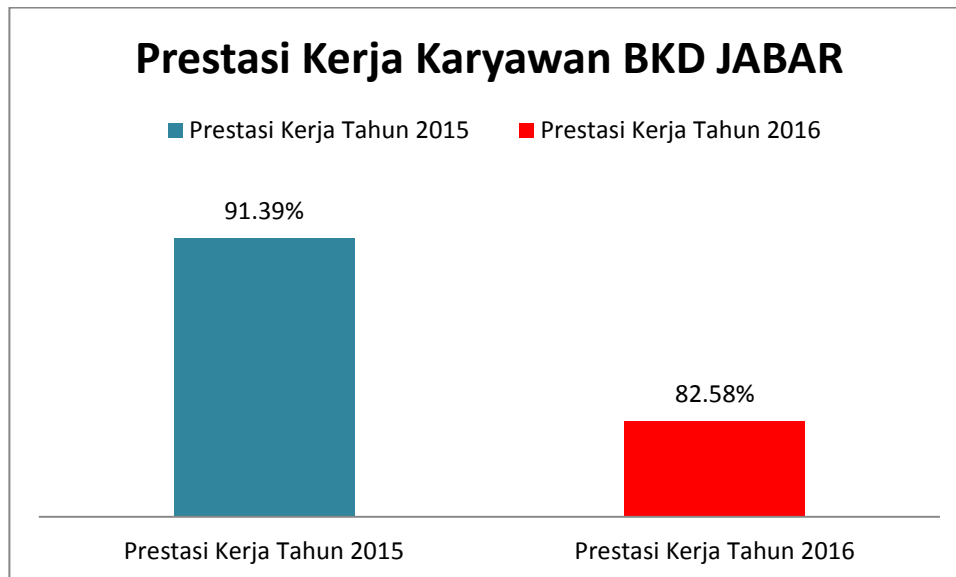
Dengan adanya program pendidikan dan pelatihan organisasi dapat menjadi *learning organization* dan tumbuh-maju karena didukung oleh karyawan yang mempelajari hal-hal baru dan mengaplikasikannya dengan tujuan memperbaiki dan meningkatkan kualitas produk atau jasa yang dihasilkan organisasi (M.Najib 2015:27)

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Povinsi Jawa Barat merupakan Lembaga Teknis Daerah yang memiliki tugas pokok untuk melakukan Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik serta berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Sebagai instasi pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat mempunyai misi yaitu mempunyai aparatur yang baik dan sejahtera. Salah satu cara untuk merealisasikan misi tersebut adalah dengan upaya peningkatan kualitas pegawai.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat berupaya untuk meningkatkan kualitas pegawai. Peningkatan kualitas pegawai tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan.

Peneliti memilih Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai bahan penelitian dikarenakan terdapat permasalahan yang dapat dilihat dengan penurunannya prestasi kerja karyawan pada tahun 2016 sebagai berikut:

Adapun data prestasi kerja pegawai dengan grafik pada gambar 1.2 dibawah ini:



(Ket: Data per pegawai tahun 2015-2016)

**(Gambar 1.2 – Grafik Prestasi Kerja Pegawai BKD Prov. JaBar 2015-2016)**

*(Sumber: SubBidang Pemetaan Kompetensi dan Kinerja BKD Prov. Jawa Barat 2015-2016)*

Pada Gambar 1.2 dapat dilihat dari segi prestasi kerja pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat belum mencapai kondisi ideal (100%), disamping itu hal tersebut terlihat dari turunnya penurunan prestasi kerja karyawan di tahun 2016 dibandingkan tahun 2015. Menunjukkan nilai total grafik pada tahun 2015 sebesar 91,39% dan pada tahun 2016 sebesar 82,58%. Menurut Tjiptoherijanto (1989) dalam H. Basri dan A. Rusdiana (20 15:34) mengatakan bahwa dengan melakukan program pendidikan dan pelatihan pegawai dapat meningkatkan kemampuan dasar ketrampilan kerja sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nenden Tatin Maryati selaku Analisis kinerja pada subidang pemetaan kompetensi dan kinerja di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwan ada beberapa faktor yang mempengaruhi prestasi kerja yaitu seperti absensi pegawai, kedisiplinan, target dalam menyelesaikan pekerjaan. Dan pada tahun 2016 banyaknya pegawai yang belum menyelesaikan target pekerjaan sehingga prestasi kerjanya menurun.

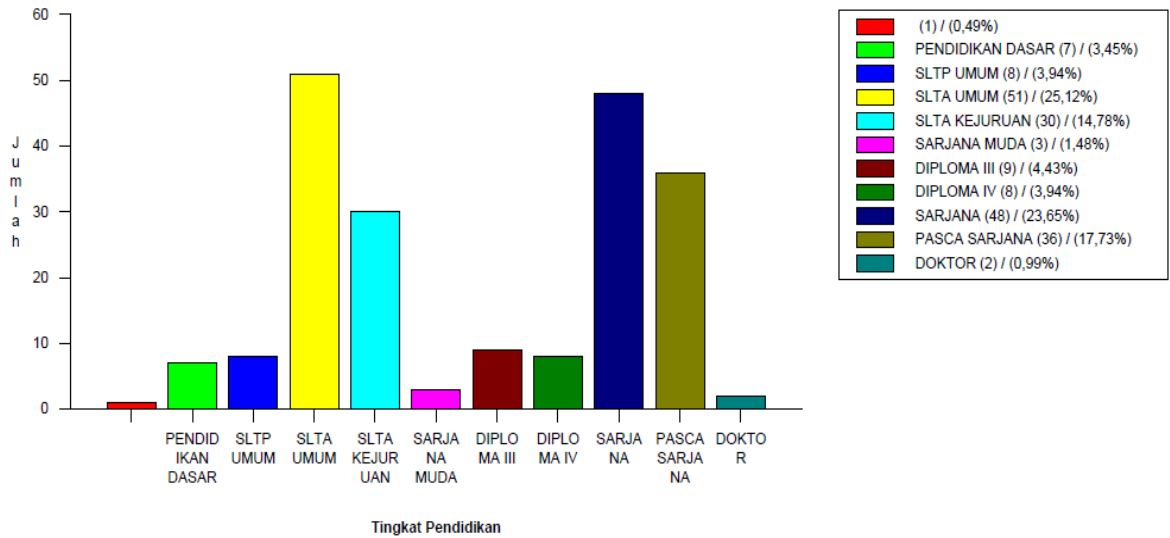
Dalam pasal 31 UU Nomor 43 Tahun 1999 disebutkan bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya diadakan pengaturan dan penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan jabatan pegawai negeri sipil (PNS) yang bertujuan untuk meningkatkan mutu keahlian, kemampuan, dan ketrampilan.

Adapun data pendidikan formal terakhir dan data program pendidikan dan pelatihan pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat kondisi tahun 2016 dapat dilihat pada gambar 1.2 dan table 1.1 berikut ini:

### Grafik PNSD Berdasarkan Pendidikan Formal Terakhir

DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

PERIODE: SEPTEMBER 2017



(Gambar 1.3 – Grafik Pendidikan Formal Terakhir di BKD Prov. JaBar)

(Sumber: SubBidang Pemetaan Kompetensi dan Kinerja BKD Prov. JaBar)

Tabel 1.1

Data Jumlah Pegawai yang Sudah Mengikuti Program pendidikan dan Pelatihan di BKD Provinsi Jawa Barat

Program Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2016		
Sudah	78	55,7%
Belum	62	44,3%
Jumlah	140	100%

(Sumber: SubBidang Pemetaan Kompetensi dan Kinerja BKD Provinsi Jawa Barat)

Berdasarkan data pendidikan formal terakhir dan data jumlah pegawai yang sudah mengikuti program pendidikan dan pelatihan di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, dapat dilihat bahwa masih banyaknya pegawai yang tingkat pendidikannya dibawah diploma sebanyak 47,78 persen dan belum mengikuti program pendidikan dan pelatihan sebanyak 44,3 persen. Berdasarkan fenomena masalah yang dihadapi instansi



saat ini yaitu kurangnya pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nenden Tatin Maryati selaku Analisis kinerja pada subidang pemetaan kompetensi dan kinerja di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa di Pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri belum dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan Program Pendidikan dan Pelatihan untuk pegawai dikarenakan jadwal kerja pegawai yang padat sehingga susah untuk pegawai melaksanakan diklat dengan tepat waktu dan selama ini pegawai dituntut untuk bisa mengerjakan pekerjaan di bidang yang sudah di tempatkan tanpa melihat latar belakang pendidikannya. Dan ada sebanyak 65% pegawai menempatkan jabatan yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan nya.

Salah satu upaya yang dilakukan organisasi untuk membuat pegawainya lebih terlatih dan berkualitas dalam melaksanakan tugasnya adalah dengan melakukan pendidikan dan pelatihan sehingga pegawai dapat meningkatkan prestasi kerja menjadi lebih baik sehingga pengetahuan mereka bertambah karena kegiatan program pendidikan dan pelatihan tersebut. Program pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan kemampuan dasar keterampilan kerja yang sekaligus mengarah pada peningkatan produktivitas kerja menurut Tjiptoherijanto (1989) dalam H.Basri & A. Rusdiana (2015:34)

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan maka penulis meneliti dan mengkaji secara seksama dengan melakukan pendekatan terhadap instansi dengan memilih judul : **“Pengaruh Program Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Prestasi Kerja Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat”**

### **1.3 Identifikasi Masalah**

Dalam penelitian ini penulis membatasi program pendidikan dan pelatihan dengan mengambil program pendidikan dan pelatihan yang ada di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat yang merupakan program pengembangan karyawan. Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang peneliti identifikasikan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan karyawan pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimanakah prestasi kerja pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat?
3. Seberapa besar pengaruh program pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat terhadap pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan yang diberikan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui prestasi kerja pegawai di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui pengaruh program pendidikan dan pelatihan terhadap prestasi kerja pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat berdasarkan persepsi pegawai.

#### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Teori penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan tentang manajemen sumber daya manusia, khususnya pendidikan dan pelatihan dan prestasi kerja pegawai. Selain itu juga untuk melihat penerapan teori-teori yang didapat dari kuliah dalam praktek dan sebenarnya.

##### **2. Kegunaan Praktis**

a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau masukan kepada perusahaan dalam mencari alternatif pemecahan masalah yang berkaitan dengan sumber daya manusia khususnya program pendidikan dan pelatihan dan prestasi kerja bagi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.

b) Disamping itu hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi bagi peneliti lain yang secara langsung maupun tidak langsung tertarik pada masalah yang diteliti peneliti.

### **1.6 Waktu dan Periode Penelitian**

Penelitian dilaksanakan mulai November s.d. Desember 2017. Adapun lokasi penelitian bertempat di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat, yang beralamat di Jl. Ternate No. 2 Kota Bandung, Jawa Barat 40115.